



LAPORAN PENELITIAN

**HALUAN NEGARA DALAM KONSTITUSI INDONESIA
UNTUK MEMPERTEGAS IDEOLOGI PANCASILA**

Oleh:

- 1. Dr. Ratna Herawati S.H., M.H. NIP:198303202008122002**
- 2. Novira Maharani Sukma, S.H., M.H. NUPN : 19891120012015012003**

Dibiayai Oleh Dana Selain APBN Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Tahun Anggaran 2017

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2017

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. Judul Penelitian:
 - a. Judul Penelitian :Haluan Negara Dalam Konstitusi Indonesia Untuk Mempertegas Ideologi Pancasila
 - b. Bidang Ilmu : Hukum Tata Negara
2. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP :198303202008122002
 - d. Jabatan Fungsional : Dosen
 - e. Jabatan Struktural : Asisten Ahli/ IIIB
 - f. Bagian : Hukum Tata Negara
3. Anggota Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Novira Maharani Sukma, S.H., M.H.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NUPN : 19891120012015012003
 - d. Jabatan Fungsional : Dosen Kontrak
 - e. Jabatan Struktural :-
 - f. Bagian : Hukum Tata Negara
4. Lokasi Penelitian : Kota Semarang
5. Lama Penelitian : 12 (dua belas) bulan
6. Biaya yang diperlukan : Rp. 20.000.000

Semarang, 27 Desember 2017

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Peneliti

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., CN., M. Hum.

Dr. Ratna Herawati, S.H., M.H.

NIP. 19621119 01987031 004

NUPN. 19891120012015012003

Abstract

State Policy is the direction for the state organizers. These guidelines can be political guidelines whether in the economic, cultural, or legal fields. The position of a guideline must be maintained consistently. The relevance and similarity between the values, rules and fundamental norms contained in UUD 1945 of the Republic of Indonesia with the formulation of a policy made by a state authority in a juridical format, in which the policy must be subject to higher provisions. After the reformation of UUD 1945 of the Republic of Indonesia, the guidelines had not existed due to the lack of State Policy. This condition has triggered the urgency of this research. There are two problems raised in this research: (1) Has Indonesia accommodated the state policy in the constitution?; and (2) How is the country policy that is compatible with the Indonesian state constitutional system? The problems are analyzed using Post-positivism paradigm with different approaches, namely legislation, conceptual, and comparative in the study of the existing literatures. Technique of checking the accuracy of the data in this research used triangulation method. The findings obtained: (1) Indonesia has accommodated the state policy in its constitution; and (2) The state policy in accordance with the Indonesian state constitutional system is as defined in the *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP)* (National Long Term Development Plan)

Keywords: State Policy, Constitution of the Republic of Indonesia, National Development.

Abstrak

Haluan Negara adalah arah dalam perencanaan pembangunan negara. Haluan negara ini dapat berupa haluan politik, ekonomi, budaya dan hukum. Posisi pedoman haluan negara ini dipertahankan secara konsisten, relevansi dan kesamaan antara nilai, haluan negara dan norma dasar yang ada dalam konstitusi Negara Indonesiadengan kebijakan formulasi yang dibuat oleh penyelenggara Negara dalam ranah hukum, yang dimana kebijakan tersebut harus tunduk pada ketentuan yang lebih tinggi. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Haluan Negara ditiadakan atau dihapuskan. Kondisi inilah yang melatarbelangi penelitian ini. Ada dua rumusan masalah yang dicari dalam penelitian ini: (1) Apakah Indonesia sudah mengakomodir haluan negara dalam konstitusi?; and (2) Bagaimana haluan negara yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia? Penelitian ini dikaji dengan paradigma positivismedengan pendekatan yang berbeda, diantaranya dengan peraturan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan literature yang memiliki kesamaan. Teknik pengecekan keakuratan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Hasil penelitian yang ditemukan: (1) Indonesia sudah mengakomodir haluan negara dalam konstitusinya; and (2) Haluan negara yang sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP).

Keywords: Haluan Negara, Constitution of the Republic of Indonesia, Pembangunan Nasional.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkah kepada penulis, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Tak lupa Penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan penelitian ini, kepada:

1. Rektor Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H., CN., M. Hum.
3. Seluruh Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah banyak memberikan saran yang membangun dalam membantu serta mempermudah penelitian ini.
4. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan motivasi dan bantuan selama penelitian berlangsung.

Semarang, 27Desember 2017

Ketua Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Negara Pancasila.....	6
B. Sistem Pemerintahan Presidensial.....	13
C. Teori Pemisahan Kekuasaan.....	18
D. HierarkiPeraturan Perundang-undangan.....	21
E. Peraturan Daerah.....	18
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	26
B. Kontribusi Penelitian	26
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan.....	28
B. Spesifikasi Penelitian	28
C. Jenis Data	29
D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Metode Analisis Data	31
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Haluan Negara Dalam Konstitusi Indonesia.....	32
B. Haluan Negara Mempertegas Ideologi Pancasila	47

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA